

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2019, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Agus Santoso, 2020, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2023, *Hukum Pidana Indonesia : Perkembangan dan Pembaruan KUHP 2023*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo, Depok.
- Bagir Manan, 2020, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2023, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pustaka Magister, Surabaya.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2019, *Teori Hukum : Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.
- Chairul Huda, 2020, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Citra Imelda, 2024, *Perkembangan Terbaru dalam Hukum Acara pidana Indonesia*, Gita Lentera, Jakarta.
- Derry Angling Kesuma, Rohman Hasyim, Affiani Kinaria, Haryadi Tobi dan Merita Enni, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2021, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- I Ketut Adi Purnama, 2023, *Purnama Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ismansyah, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Indoharto, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2022, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Lukman Hakim, 2021, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2020, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2023, *Hukum Pidana: Konsep dan Penerapannya dalam Pembaruan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S., 2021, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, 2021, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Nilma Suryani, 2022. *Penerapan Saksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau)*. Rajawali Pers, Depok.
- Ni'matul Huda, 2019, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2017, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Wiyono, 2021, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Satria Ferry, Faisal A. Rani, Eddy Purnama, Saleh Sjafei, 2023, *Eksistensi Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Beberapa Negara*, Hawa dan AHWA, Aceh.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penafsiran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sj achran Basah, 2018, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 2019, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susi Marni, Maulidya Permatasari, Tamaulina Br. Sembiring, Iwan Henri Kusnadi, Ader Risna Sari, Andrew Shandy Utama, Muhammad Sawir, Baren Sipayung, Suarlin, Emesta Arita Ari, 2024, *Hukum Administrasi Negara : Konsep dan Implementasi*, Eureka Media Sains Indonesia, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Syakir, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, BPSDM Kemenkumham Press, Jakarta.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Buku Hukum Pidana Final*, Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Topo Santoso, 2020, *Suatu Pengantar Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok.

Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Yenti Garnasih, 2020, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, FH UI Press, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar, 2021, *Lembaga Negara Independen: Dinamika dan Tantangan*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. JURNAL

Adianto, Hedwig & Mau “*Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 6, 2024.

Agus Surono, “*Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 3, 2020.

Agus Surono, “*Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana*”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 3, 2020.

Andi Febriansyah Alsabah, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2018.

Arief Hidayat dan Zaenal Arifin Mochtar, “*Kebijakan Publik, Diskresi, dan Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Negara*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 3, 2022.

- Aryaputra, Muhammad Iftar & Ani Triwati, "*Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan bagi Korporasi dalam KUHP Nasional*", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2, 2023.
- Bambang Widjojanto, "*Korupsi Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum*", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018.
- Bambang Widjojanto, "*Reformulasi Kerugian Keuangan Negara dalam Hukum Pidana Korupsi*", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 4, 2016.
- Burrohim, Habi, I Gede Widhiana Suarda & Ainul Azizah, "*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi*", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- E. Effendi, F. Wahyuni, dan N. Suryani, "*Implementation of Restorative Justice to Corruption Crimes According to The Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Law*", *Nagari Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Eddy O.S. Hiariej, "*Makna Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Endah Cahyani, "*Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Erja Fitria Virginia dan Eko Soponyono, "*Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Faisal Santiago, "*Kerugian Negara dan Pembuktian Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021.
- Fathudin, "*Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)*", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 115-132.
- Herlambang P. Wiratraman, "*Kriminalisasi Kebijakan dan Tantangan Negara Hukum*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, 2021.

- Ilham Febrio, Ahmad Fist Cal Baihaqi dan Kusma Febri Handayani, “*Indikator Delik Suap dan Gratifikasi*”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Indriyanto Seno Adji, “*Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Pidana*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44, No. 3, 2014.
- Indriyanto Seno Adji, “*Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018.
- Ingka Harsani Nasution, “*Sistem Pelaporan Gratifikasi*”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 8, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, “*Penguatan Peran Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2015.
- Juliani & Henny, “*Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara*”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 54-70.
- Laiti, Sardi & Fenti U. Puluhulawa, “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Yang Mengakibatkan Kerugian Negara*”, *Philosophia Law Review*, Vol. 2, No. 1, Mei 2022.
- Mahrus Ali, “*Dilema Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, 2021.
- Marfuatul Latifah & Prianter Jaya Hairi, “*Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim*”, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 15, No. 2, 2024.
- Margaret Pangaribuan, Ester Simanjuntak, Feby Adelia Parhusip, Muhammad Rifai dan Berliana Sianturi, “*Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus*”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Mulyani, Sri; Iga Sonia Soraya; Lara Berlianti; Husnul Fikri; Hendrison & Andre, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam KUHP Baru*”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 2549-2555.

- Nilma Suryani dan A. C. Fajar, “Kapita selekta terhadap kebijakan kejaksaan dalam mengeksekusi aset terpidana perkara korupsi yang telah habis.” *UNES Law Review*, 8(2), (2025) 684–694.
- Nani Mulyati, *Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Sektor Private di Negara ASEAN*, *Unes Journal of swara Justisia*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 722.
- Noviyanti, Rahma, Elwi Danil, dan Yoserwan Yoserwan. "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3.1 (2019): 1-22.
- Ni'matul Huda, “Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 3, 2016.
- Ongky Suharto dan Hendri Ariantoni, “Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Penyalahgunaan Wewenang”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023.
- Putra, Nandha Risky & Rosa Linda, “Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 13-24.
- Saldi Isra, “Penegakan Hukum Korupsi dan Tantangan Kepastian Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Saldi Isra, “Peran Kekuasaan Kehakiman dalam Penguatan Negara Hukum Demokratis”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, 2020.
- Shidarta, “Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Silalahi, Dian Hardian, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia”, *Warta Dharmawangsa*, Vol. 18, No. 4, 2024.
- Sinta Wulandari, “Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Yuridis Indonesia*, Vol. 8, No. 4, 2023.
- Sitohang, Hisar, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif”, Tesis, Universitas HKBP Nommensen, 2020.
- Sulistyowati Irianto, “Peran Hakim dalam Pembaruan Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 3, 2017.

Supandi, “*Diskresi Pejabat Publik dan Batas Pertanggungjawaban Pidana*”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2, 2021.

Susilo, Jenny Susmita, Elwi Danil & Nani Mulyati. "Pemiskinan koruptor sebagai alternatif pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dikaitkan dengan rancangan undang-undangan perampasan aset." *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1 (2023): hlm. 3718-3730.

Taufiqurrohman Syahuri, “*Kriminalisasi Kebijakan dalam Perspektif Negara Hukum*”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 3, 2021.

Topo Santoso, “*Korporasi dan Pejabat Publik sebagai Subjek Hukum Pidana*”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 2, 2019.

Topo Santoso, “*Pendekatan Penal dan Non-Penal dalam Pemberantasan Korupsi*”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, 2020.

Widodo Dwi Putro, “*Pembuktian Kerugian Keuangan Negara*”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Widodo Dwi Putro, “*Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum*”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 2, 2014.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, “*Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3, 2020.

Zulkarnain, Iskandar & Afif Syarif, “*Analisis Yuridis Kerugian Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara*”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2019.

C. WEBSITE

Renata Christha Auli, “*Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/> dikunjungi pada tanggal 2 September 2025 jam 11.00.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 764.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 *Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

